

KONTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN, *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Fitri Valentine Mawu¹, Paulus Kindangen², Rosalina A.M Koleangan³
fitrymawu@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial Program Keluarga Harapan, *Universal Health Coverage* dan Pendidikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kesejahteraan ekonomi merupakan keadaan yang dicapai dari usaha manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utamanya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahoobim, et al (2012) menunjukkan bahwa UHC memberikan dampak terhadap kualitas hidup sehat masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui beberapa indikator berikut. Pertama Affordability: Access to care (Keterjangkauan: Akses ke perawatan). Kontribusi PKH terhadap kesejahteraan ekonomi sudah tergambar dari teori konsumsi Keynes, dimana pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner penelitian dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan, *Universal Health Coverage* dan Pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara, Secara parsial Program Keluarga Harapan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara, Secara parsial *Universal Health Coverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Secara parsial Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dapat di simpulkan bahwa program PKH, UHC dan Pendidikan dapat di pertahankan dan tingkatkan untuk Kesejahteraan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci : Kontribusi Program Keluarga Harapan, Pendidikan, *Universal Health Coverage* dan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the simultaneous and partial effect of the Family Hope Program, Universal Health Coverage and Education on the Economic Welfare of the Community in Southeast Minahasa District. Economic welfare is a condition that is achieved by human endeavors, so the quality of human resources is the main determining factor. Research conducted by Ahoobim, et al (2012) shows that UHC has an impact on the quality of people's healthy life, and the economic welfare of the community, through the following indicators. First Affordability: Access to care (Affordability: Access to care). PKH's contribution to economic welfare has been illustrated by Keynes's conceptual theory, that consumption expenditure by the household sector in the economy depends on income.

This type of research is the type of associative research. The data technique used a research questionnaire and the data analysis technique used multiple linear regression. The results show that the Harapan Family Program, Universal Health Coverage and Education simultaneously have a significant effect on the Level of Economic Welfare of the Community in Southeast Minahasa Regency, Partially the Harapan Family Program has a positive and insignificant effect on the Level of Community Economic Welfare in Minahasa District. Southeast, Partially Universal Health Coverage has a significant positive effect on the Level of Economic Welfare of the Community in Southeast Minahasa Regency and Partially Education has a significant positive effect on the Level of Community Economic Welfare in Southeast Minahasa Regency. It can be concluded that the PKH, UHC and Education programs can be maintained and improved for the Economic Welfare of Southeast Minahasa District.

Keywords: *Contribution of the Hope Family Program, Education, Universal Health Coverage and Community Economic Welfare Level*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola secara maksimal potensi daerah, agar dapat mensejahterakan masyarakat. Harapannya, berdasarkan otonomi daerah dapat tercapai efisiensi, efektivitas dan transparansi sesuai peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Erwin Saraswati (2018). Hal ini berarti dalam otonomi daerah terkandung tiga misi utama, yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2004).

Pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan secara sifat dan pola yakni mengikuti perkembangan jaman. Sebelumnya dilakukan manual kini harus secara digital. Hal ini untuk terciptanya *good governance* didalam pemerintahan khususnya di daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kerangka pengambilan keputusan. Maka dari itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci untuk menguji apakah pengelolaan keuangan daerah telah mencapai pada sasaran yang diinginkan.

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan kemudian bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Anton Trianto (2016). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tugas Pokok yaitu: Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, serta perumusan kebijakan teknis pemberian perizinan, dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan unit pelaksana Dinas, pengelolaan urusan

ketatalaksanaan, pembinaan teknis operasional. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tugas Pokok yaitu : Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, serta perumusan kebijakan teknis pemberian perizinan, dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan unit pelaksana Dinas, pengelolaan urusan ketatalaksanaan, pembinaan teknis operasional.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sisi pengeluaran daerah atau belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pengklasifikasian jenis-jenis belanja ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan belanja tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola anggarannya berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran sebagai masukan (*input*) dalam kegiatan pemerintahan tentunya terdapat keluaran (*output*) yang diharapkan yakni dalam bentuk program/kegiatan, dimana semakin besar *output* yang dihasilkan seiring dengan penggunaan *input* yang rendah akan menghasilkan kinerja yang efisien. Semakin efisien kinerja pemerintah daerah maka sisa anggarannya semakin besar, sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, penilaian kinerja berdasarkan asas efisiensi akan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Pencapaian kinerja pemerintah secara efektif dan efisien bukan sesuatu hal yang mudah, hal ini dapat dilihat dari fenomena rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi hampir diseluruh pemerintah daerah (Sopannah, 2016). Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan kinerja pemerintah belum efektif dalam merealisasikan anggaran, sehingga beberapa program kerjanya tidak bisa didanai. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mencatat mayoritas pemerintah daerah masih lebih banyak menggunakan anggarannya untuk menggaji pegawai ketimbang membelanjakannya untuk proyek pembangunan, sehingga menunjukkan kinerja yang tidak efisien (Kumolo, 2016).

Beberapa fenomena yang disebutkan di atas memotivasi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, yang akan dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Adapun permasalahan terkait dengan pengelolaan anggaran belanja pada di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2017-2019 yaitu masih ada sisa anggarannya setiap tahun yang cenderung menurun seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara dari Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/Kurang
2017	13.315.148.784.76	12.229.160.524.00	1.085.988.260.76
2018	10.467.497.296.26	9.309.019.722.00	1.158.477.575.26
2019	8.484.315.686.58	7.819.478.412.00	664.565.566.58

Sumber: Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman pada era otonomi daerah kini.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2017 – 2019?
2. Bagaimana pola perkembangan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2017 – 2019?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman selang tahun 2017– 2019.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah melalui penelitian yang dilakukan.
- b) Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c) Bagi Pihak Pemkab Minahasa Tenggara, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan

sehingga pemerintah akan dapat menyusun strategi dalam rangka memenuhi prinsip good governance.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Otonomi Daerah

Fenomena yang cukup menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Daerah kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Menurut Allen (dalam Kuncoro, 2004: 3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Suparmoko (2002:26) anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap penerimaan atau pengeluaran dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 april sampai dengan 31 maret tahun berikutnya. Namun khusus tahun 2000, tahun anggaran di mulai pada tanggal 1 april dan berakhir pada tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya sisi penerimaan disebut juga sumber penerimaan daerah, menurut penjelasan UU RI No.32 tahun 2004.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Lincoln Arsyad (2005 :22-23) pembangunan ekonomi adalah seperti suatu proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat berikutnya. pembangunan perlu dipandang sebagai kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya Menurut Sukirno S. (2006:3-4) dalam bukunya mengatakan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari hal ini di harapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan akan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Dalam analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai proses, supaya saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Dengan cara analisis ini dapat diketahui deretan peristiwa yang akan timbul dan akan mewujudkan peningkatan dan dalam taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu kenaikan, itu merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam suatu kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Todaro.M.P (1994: 52) berpendapat bahwa dalam istilah ekonomi “Pembangunan” biasa diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama untuk berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan produk nasional brutonya, sebuah indeks ekonomi yang umum dipakai untuk mengetahui kemajuan pembangunan adalah menggunakan tingkat pertumbuhan GNP perkapita, agar dapat memperhitungkan kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan outputnya pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Pembangunan ekonomi didefinisikan kembali dalam rangka pengurangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran dalam hubungan dengan perekonomian yang sedang tumbuh.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007:330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019, 3 (tiga) prinsip ini harus terpenuhi yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2012:147), pengukuran kinerja pengelolaan keuangan adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

1. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Efisiensi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Menurut Mahsun dalam Sumenge (2013), tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumusnya dapat dilihat berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2015

2. Pengukuran Kinerja Anggaran Belanja dengan Menggunakan Konsep Efektifitas

Menurut Ulum (2012:28), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2015

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017-2019 dan data yang dapat diukur secara tidak langsung dan bukan berupa angka atau bilangan melainkan berupa data yang diperoleh dari literatur terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017-2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang diambil dari catatan atau arsip yang ada di lokasi penelitian yang selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Definisi Operasional Variabel

1. Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengawasan atas anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SPKD) Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Analisis efisiensi adalah perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.
3. Analisis efektivitas, adalah proses perbandingan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja. Analisis Efisiensi, yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Menurut Ulum (2012:33), rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi belanja adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100$$

Dengan kriteria efisiensinya yaitu:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Analisis efektivitas, yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Menurut Ulum (2012:32), rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas anggaran belanja adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100$$

Dengan kriteria efektivitasnya yaitu:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Pengukuran Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara

Pengukuran Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara terletak pada komponen Belanja langsung Tahun Anggaran 2017-2019. Belanja

Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Untuk dapat mengetahui tingkat Efisiensi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table 2 dibawah ini:

Tabel 2 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dinas Perkim Mitra Tahun 2017-2019

Tahun	Triwulan 1		
	Realisasi Langsung	Belanja	Efisiensi
2017	533.233.983,00	863.118.735,00	61,78
2018	605.179.622,00	1.021.759.918,00	59,23
2019	371.167.440,00	592.364.689,00	62,66

Tahun	Triwulan 2		
	Realisasi Langsung	Belanja	Efisiensi
2017	3.106.046.831,00	3.899.776.400,00	79,65
2018	2.943.692.746,00	3.925.690.971,00	74,99
2019	936.449.543,00	1.807.693.491,00	51,80

Tahun	Triwulan 3		
	Realisasi Langsung	Belanja	Efisiensi
2017	7.255.164.299,00	8.518.628.835,00	85,17
2018	4.741.699.009,00	6.260.271.321,00	75,74
2019	1.905.979.368,00	3.377.203.534,00	56,44

Tahun	Triwulan 4		
	Realisasi Langsung	Belanja	Efisiensi
2017	10.544.070.722,00	12.229.160.524,00	86,22
2018	7.296.941.743,00	9.309.019.722,00	

			78,39
2019	5.782.323.148,00	7.819.478.412,00	73,95

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 Triwulan 1 menunjukkan pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara efisien, pada triwulan II pengelolaan keuangan pada dinas ini sangat efisien. Pada triwulan III pengelolaan keuangan pada dinas ini cukup efisien dan pada triwulan IV pengelolaan keuangan pada dinas ini cukup efisien. Pada tahun 2018, Triwulan 1 menunjukkan pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara sangat efisien, pada triwulan II pengelolaan keuangan pada dinas ini sangat efisien. Pada triwulan III pengelolaan keuangan pada dinas ini cukup efisien dan pada triwulan IV pengelolaan keuangan pada dinas ini efisien. Pada tahun 2019, Triwulan 1 menunjukkan pengelolaan keuangan di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara sangat efisien, pada triwulan II pengelolaan keuangan pada dinas ini sangat efisien. Pada triwulan III pengelolaan keuangan pada dinas ini sangat efisien dan pada triwulan IV pengelolaan keuangan pada dinas ini efisien. Jika melihat pola pengelolaan Belanja Operasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara dari tahun 2017-2019 setiap triwulan berkisar pada cukup efisien, efisien dan sangat efisien dan jika di rata-ratakan, pengelolaan keuangan pada dinas ini adalah efisien.

Analisis Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara

Untuk dapat mengetahui tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara berdasrkan Laporan Realisasi Anggaran dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table 3 dibawah ini:

Tabel 3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perkim Mitra Tahun 2017-2019

Tahun	Triwulan 1					
	Anggaran	Target	Realisasi Belanja	Lebih/Kurang	Efisiensi	Ket
2017	13.315.148.784,76	3.328.787.196,19	863.118.735,00	-2.465.668.461,19	25,93	Tidak Efektif
2018	10.795.092.336,00	2.698.773.084,00	1.021.759.918,00	-1.677.013.166,00	37,86	Tidak Efektif
2019	8.560.167.296,27	2.140.041.824,07	592.364.689,00	-1.547.677.135,07	27,68	Tidak Efektif

Tahun	Triwulan 2					
	Anggaran	Target	Realisasi Belanja	Lebih/Kurang	Efisiensi	Ket
2017	13.315.148.784,76	4.438.382.928,25	3.899.776.400,00	-538.606.528,25	87,86	Cukup Efektif

2018	10.795.092.336,00	3.598.364.112,00	3.925.690.971,00	327.326.859,00	109,10	Sangat Efektif
2019	8.560.167.296,27	2.853.389.098,76	1.807.693.491,00	- 1.045.695.607,76	63,35	Kurang Efektif

Tahun	Triwulan 3					
	Anggaran	Target	Realisasi Belanja	Lebih/Kurang	Efisiensi	Ket
2017	13.315.148.784,76	6.657.574.392,38	8.518.628.835,00	1.861.054.442,62	127,95	Sangat Efektif
2018	10.795.092.336,00	5.397.546.168,00	6.260.271.321,00	862.725.153,00	115,98	Sangat Efektif
2019	8.560.167.296,27	4.280.083.648,14	3.377.203.534,00	- 902.880.114,14	78,91	Cukup Efektif

Tahun	Triwulan 4					
	Anggaran	Target	Realisasi Belanja	Lebih/Kurang	Efisiensi	Ket
2017	13.315.148.784,76	13.315.148.784,76	12.229.160.525,00	- 1.085.988.259,76	91,84	Efektif
2018	10.467.497.296,26	10.467.497.296,26	9.309.019.722,00	- 1.158.477.574,26	88,93	Cukup Efektif
2019	8.484.315.686,58	8.484.315.686,58	7.819.478.412,00	- 664.837.274,58	92,16	Efektif

Berdasarkan pengolahan data di atas, pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara berada pada kategori tidak efektif kemudian kategorinya meningkat pada triwulan selanjutnya. Hal ini terjadi karena mekanisme anggaran daerah dalam proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD proses ini biasanya terlaksana pada saat triwulan I mulai berjalan sehingga pencairan anggaran tiap SKPD seringkali baru mulai dilaksanakan pada akhir triwulan I sehingga tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada triwulan I menempati kriteria tidak efektif. Dalam penelitian ini, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada sangat meningkat pada triwulan II dan III karena program-program kegiatan yang belum terlaksana pada

triwulan I baru terlaksana pada triwulan II dan dan ada Sebagian program yang belum terlaksana pada triwulan II dilaksanakan pada triwulan III dan akhirnya stabil pada triwulan IV.

Pembahasan

Analisis capaian kinerja pengelolaan keuangan meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang ditetapkan sehubungan dengan penggunaan anggaran. Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam penggunaan anggaran belanja yang efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara mendapatkan dana pemasukan (input) dari Pemerintah Provinsi. Dana tersebut digunakan (output) untuk memberikan pinjaman atas nama pemerintah daerah kepada masyarakat. Tercapainya semua kegiatan yang direncanakan maka memperoleh hasil (outcome) yang meningkat. Dan manfaat (benefit) yang diperoleh dalam memberikan pinjaman atas nama pemerintah kepada masyarakat cukup baik. Dampaknya (impact) yaitu kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara cukup bagus, karena program yang direncanakan direalisasi sesuai prosedur dan diselesaikan tepat waktu. Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara yaitu, penataan permukiman kelurahan pengadaan papan nama jalan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, pengadaan lahan pembangunan perumahan daerah pesisir, pemeliharaan lampu jalan, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal, untuk menilai keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat yaitu laporan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara. pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara. dengan cara menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Analisis Pengukuran Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara

Asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Dalam lingkup penganggaran pemerintahan, penerapan asas efisiensi salah satunya dapat dilihat dari besarnya pengalokasian belanja langsung, karena belanja langsung terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan sehingga semakin besar belanja yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, mengindikasikan kinerja yang tidak efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kinerja yang efisien menunjukkan banyaknya program/kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sedikit sumber dayanya, yaitu belanja langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran belanja target yang telah ditetapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara tahun anggaran 2017-2019 mencakup efisien.

Analisis Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara

Efektivitas termasuk salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam lingkup penganggaran pemerintahan, asas efektivitas dapat dilihat dari pencapaian setiap target keuangan yang telah ditetapkan, karena dalam penyusunan anggaran memiliki karakteristik yang bersifat ramalan atau estimasi (perencanaan) yang akan dijalankan dalam satu periode anggaran, biasanya selama satu tahun. Oleh karena itu penilaian kinerja berdasarkan asas efektivitas bertujuan untuk menilai kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui umumnya pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara tahun anggaran 2017-2019 sudah terealisasi secara efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan: Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara setiap triwulan berfluktuasi namun terbilang baik selama tahun anggaran 2017-2017 umumnya sudah efisien. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara setiap triwulan juga berfluktuasi namun terbilang baik selama tahun anggaran 2017-2019 umumnya sudah efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: Pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Minahasa Tenggara yang efektif dan efisien selama beberapa tahun terakhir ini hendaknya bisa dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya, dengan cara melakukan estimasi penyusunan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik lagi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian sejenis yang lebih baik pada lingkup yang lebih besar. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan dan anggaran daerah di SKPD Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Ni Luh Nana Putri & A.A.N.B. Dwirandra, 2014, Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 6. No 3 (2014): 481-497
- Devas, et al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (terjemahan Masri Maris). UI-Press. Jakarta.
- Gousario, Freska. 2015. *Regional Financial Performance and Human Development Index Based On Study In 20 Countries/Cities Of Level 1 Region*. Journal Winners, Volume 16. No. 2, September 2015: 152-165

- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Haryanto, Joko Tri, 2018. *Regional financial performance evaluation in the Indonesian fiscal decentralization era*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.3, January – March 2018
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
- Lincoln.1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.BPFE.Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Materi Pelatihan Pendapatan Pendapatan Daerah, 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PenerbitANDI.
- Moleong, Lexy J. (2012).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Manopo, Novlie, 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/10249>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019
- Ryan, C. And Ng, C. 2000. *Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reprotng practices in Queensland*. Australian Journal of Public Administration. Hal. 11-23.
- Saraswati, Erwin. 2019. *Efisiensi Dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey Pada Pemda Di Jawa Timur)*”. *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (November 13, 2018): 1020-1045.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/249>.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013. Diakses Oktober 24, 2019
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1941/1538>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Bukit Buchori, et, al. 2016. *Efficiency And Effectiveness Analysis Of Village Financial Management (Vfm) (Case Study Asahan Regency)*.International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)) Vol. 2, No. 2, October 2016, pages 136-151
- Sukirno Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-2, Penerbit Kencana Perdana Media Group
- Suparmoko M.A.,2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta

_____2011. *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*.(Yogyakarta: BPFE) Cetakan Pertama.

Todaro M. P. 1997.*Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jilid 1. Penerbit Erlangga Jakarta

Trianto, Anton. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Efiesnsi Pengelolaan Keuangan Daearah Di Kota Palembang*. Jurnal Akuntansi AKUISISI Vol 12, No 1 (2016).(<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92/67>)

